

CAKRAWALA PERUBAHAN

Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan

SAMBUTAN

Syamsu Qamar Badu
Rektor Universitas Negeri Gorontalo

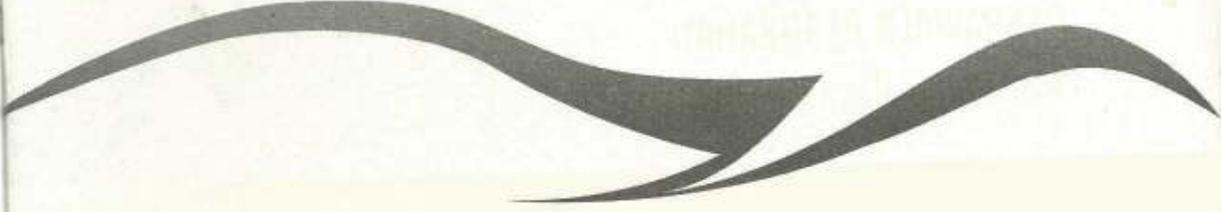
KATA PENGANTAR

Sarson W. Dj. Pomalato
Pembantu Rektor Bidang Akademik

EDITOR

Harto Malik - Lukman A. R. Laliyo
Basri Amin - Wrastawa Ridwan





CAKRAWALA PERUBAHAN

Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan

SAMBUTAN

Syamsu Qamar Badu
Rektor Universitas Negeri Gorontalo

KATA PENGANTAR

Sarson W. Dj. Pomalato
Pembantu Rektor Bidang Akademik

EDITOR

Harto Malik – Lukman A. R. Laliyo
Basri Amin – Wrastawa Ridwan



CAKRAWALA PERUBAHAN

Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan

Copyright @UNG PRESS 2013

Penerbit UNG PRESS
Jl. Sudirman No. 06 Kota Gorontalo

CETAKAN PERTAMA, Agustus 2013

Di perbanyak oleh PPIK-UNG

Editor:

Harto Malik

Lukman A. R. Laliyo

Basri Amin

Wrastawa Ridwan

ISBN: 978-979-1340-56-4

KATALOG DALAM TERBITAN

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All Right Reserved

DAFTAR ISI

CATATAN EDITOR – viii

PENGANTAR – x

Sarson W. Dj. Pomalato

Pembantu Rektor Bidang Akademik

SAMBUTAN – xii

Syamsu Qamar Badu

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

PENULIS TAMU : – 1

MEMBANGUN EKONOMI, SAINS, TEKNOLOGI, TENAGA KERJA DAN INDONESIA
MENUJU 2045

1. Sains, Teknologi dan Masyarakat: Pendidikan Sains dan Teknologi Masa
Depan

Ary Mochtar Pedju – 2

2. Strategi Pola Tiga Jalur Menuju Indonesia Tahun 2045

Bakri Arbie – 12

3. Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan dalam Upaya Penempatan Tenaga
Kerja

Reyna Usman – 30

4. Membangun Ekonomi Indonesia dari Gorontalo melalui *Knowledge-Driven
Economy*

H. Werner Katili – 38

BAB I – 45

MASA DEPAN PENDIDIKAN INDONESIA, MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

1. Kurikulum 2013 Menuai Konflik

Enos Taruh – 46

2. Globalisasi dan Kesemrautan Pengelolaan Pendidikan

Hamzah B. Uno – 51

3. Membumikan Pendidikan Karakter

Yulianto Kadji – 62

4. Mengapa Pendidikan Luar Sekolah sebagai Residu?
Misran Rahman – 74
5. Sudahkah Pendidikan di Indonesia Direncanakan? (Suatu Analisis atas Kegagalan Pendidikan)
Nina Lamatenggo – 82
6. Tantangan dalam Membangun Karakter Bangsa Pasca Reformasi
Sukarman Kamuli – 95
7. Sinergitas Guru dan Dosen: Solusi Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Muslimin – 102
8. Menggugat Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Hukum di Gorontalo
Fence Wantu – 110

BAB II – 115

KEARIFAN LOKAL, PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Bahasa Inggris dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Hasanuddin – 116
2. 21st Century Teaching: Understanding The Needs Of The Digital Natives
Karmila Machmud – 128
3. Bagaimana Membentuk Pendidik Berkarakter Keilmuan dan Akhlak Melalui Pembelajaran Sains dan Teknologi?
Elya Nusantari – 136
4. Budaya Baca Tulis Sebagai Simbol Pencitraan Peradaban dan Pencerdasan Anak Bangsa
Fatmah AR. Umar – 145
5. Kurikulum dan Kearifan Lokal
Yusuf Djafar – 151
6. Muliakan Ilmu Melalui Pendidikan Nilai (Mata Rantai yang Hilang dalam Pengajaran yang Berkualitas)
Ruslin Badu – 159
7. Supervisi Pembelajaran IPA
Yoseph Paramata – 168
8. Pembelajaran IPA Pembentuk Karakter Bangsa
Astin Lukum – 175
9. Matematika, Pencerdasan Anak dan Pendekatan Konstektual
Evi Hulukati – 180
10. Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Budaya untuk Mencerdaskan Aspek Sosial (SQ) Siswa
Supriyadi – 189

11. Menyasati Kejenuhan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Keterampilan Berbicara)
Asna Ntelu – 195
12. Mengapa Guru Terlibat dalam Kasus Amoral
Nur Kasim – 202

BAB III – 209**SEKTOR PERTANIAN, PESISIR DAN KETAHANAN PANGAN**

1. Peminggiran Sektor Pertanian dalam Teori dan Praktek
Mahludin Baruadi – 210
2. Diversifikasi Jagung Sebagai Alternatif Ketahanan Pangan Gorontalo
Ani M. Hasan – 218
3. Ketahanan Pangan dan Pencerdasan Anak Bangsa
Mohamad Iqbal Bahua – 225
4. Pendekatan Kolaborasi untuk pengelolaan TelukTomini
Abd. Hafidz Oli'i – 233
5. *Seafood Safety* dan Implementasi Analisis SWOT *Quality System*
Rieny Sulistijowati S. – 242

BAB IV – 251**LINGKUNGAN, KONSERVASI DAN ENERGI**

1. Kecerdasan Ekologis: Suatu Strategi Menyelamatkan Ekosistem Pesisir
Ramli Utina – 252
2. Strategi Pengelolaan Ekosistem Sungai Tulabolo Akibat Aktivitas Penambangan Tradisional
Marike Machmud – 259
3. Amdal/UKL-UPL vs Pembangunan
Fitryane Lihawa – 270
4. Kemampuan dan Kesesuaian Lahan Pertanian Jagung secara Spasial Ekologis di DAS Alo Kabupaten Gorontalo
Sunarti Eraku – 277
5. Energi Terbarukan untuk Pembangkit Listrik Masyarakat Daerah Terpencil
Sardi Salim – 283

BAB V – 291**IDENTITAS LOKAL, KEBUDAYAAN DAN PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA**

1. Sendi Adat dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo
Moh. Karmin Baruadi – 292
2. Manajemen Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah menjadi Perilaku Pendidik dalam Kontelasi Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal
Arwildayanto – 301

3. Bahasa Gorontalo, Penggunaan dan Penyimpangannya dalam Tulisan
Ellyana Hinta — 308
4. Dua Identitas Utama dalam Bahasa Adat Peminangan Suku Gorontalo
Dakiah DjoU — 316
5. Bahasa Indonesia Menuju Kepunahan
Sance A.Lamusu — 323

BAB VI — 331

KEBIJAKAN, LOKOMOTIF EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN

1. Menggerakkan Lokomotif Ekonomi Nasional dari Timur
Muh. Amir Arham — 332
2. Evaluasi Kebijakan Perikanan Tangkap melalui Persyaratan Kawasan
Minapolitan di Kabupaten Gorontalo
Alfi Sahri R. Baruadi — 340
3. Transparansi dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hanya
Wacana
Arifin Tahir — 346
4. Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Perspektif *Capacity
Building* di Daerah Hasil Pemekaran
Udin Hamim — 355
5. Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak: Suatu Keniscayaan atau Petaka
Amir Halid — 366
6. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terhadap Warga
Miskin di Provinsi Gorontalo
Rany Hiola dan Robert Tungadi — 376

BAB VII — 385

PEMBANGUNAN HUKUM, BIROKRASI DAN KEPENTINGAN PUBLIK

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum
Moh Rusdiyanto Pulu Hulawa — 386
2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Guru
Johan Jasin — 395
3. Guru dalam Himpitan Politik sebagai Fenomena Politisasi Birokratisasi di
Kota Gorontalo
Sastro Mustapa Wantu — 403
4. Penyelenggaraan Administrasi Publik dalam Perspektif Adat
Walidun Husain — 410
5. Audit Kinerja Sektor Publik
Imran Rosman Hambali — 420
6. Kejahatan dalam Ekonomi
Rahman Pakaya — 430

BAB VIII — 437

DINAMIKA 50 TAHUN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (1963-2013)

1. Strategi Pengembangan Fasilitas UNG melalui Proyek IDB 7 in 1
Eduart Wolok — 438
2. Tantangan Internasionalisasi UNG
Azis Salam — 444
3. Limah Puluh Tahun UNG sebagai Tahun Emas: Sebuah Refleksi dan Momentum menuju Perguruan Tinggi Berkelas Dunia
Syarifuddin Achmad — 452
4. Menciptakan Sinkronisasi Wewenang dan Tanggung Jawab di Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
Zuchri Abdussamad — 459
5. Pengembangan Kewirausahaan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Gorontalo
Sitti Roskina Mas — 466
6. Perencanaan Lingkungan Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Suatu Perspektif dan Strategi
Fitria S. Bagu — 476
7. Menempa "Generasi Emas" di Kampus Merah Maron
Bajang Asrin — 482
8. Mari Belajar dari Kelemahan Kita
Moon Hidayati Otoluwa — 492

DATA EDITOR DAN PENULIS — 498

Menggerakkan Lokomotif Ekonomi Nasional dari Timur

Muh. Amir Arham

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas, lebih dari separuh luasan wilayahnya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Letaknya cukup strategis sebagai modal perdagangan internasional, maupun bentuk kerjasama regional dikawasan Asia Pasifik. Namun demikian pembangunan ekonomi masih sangat timpang, kontribusi ekonomi nasional masih didominasi oleh provinsi di Jawa dan Sumatera, sementara di wilayah KTI kontribusinya kurang dari 30 %. Infrastruktur dan kualitas SDM juga masih tertinggal, meski jika dilihat potensinya wilayah KTI memiliki resources yang besar. Jika dioptimalkan KTI akan menjadi lokomotif ekonomi nasional dengan syarat mendapatkan perhatian serius dan perlakuan khusus, termasuk faktor demografi. Jika faktor demografi tidak dibenahi maka selamanya KTI akan tertinggal kendati memiliki potensi.

Pengantar

Luas wilayah Indonesia yang di dalamnya terkandung banyak potensi sebagai modal pembangunan, potensi ini pula menarik minat banyak bangsa lain datang ke Indonesia. Jika di tarik dalam epos sejarah, orang Eropa datang ke Indonesia bukan hanya untuk berdagang, akan tetapi juga menguasai (monopoli) komoditi-komoditi strategis. Untuk menjaga kontinuitas komoditi strategis, mereka memanfaatkan lahan yang subur untuk mengembangkan komoditi yang diperlukan dipasaran Eropa masa itu.

Memasuki paruh kemerdekaan Indonesia, telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar secara nasional. Kemajuan ekonomi juga telah membawa konsekuensi dan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya.

Namun harus disadari bahwa kemajuan yang telah dicapai saat ini bukan berarti tidak menimbulkan *side effect* pembangunan. Strategi pembangunan yang dipilih pada masa lalu dengan menekankan efisiensi (pertumbuhan) dengan asumsi

akan akan ada efe
macam persoalan.
dan sekitarnya). H
infrastruktur melo
lahan makin mer
Memenuhi kebutu
lahan produktif m

Laju alih fung
jumlah penduduk
mahal. Sementara
menurun, sehing
membawa masala
yang serius. Bahk
satu sebabnya ka
lahan menjadi no
Indonesia, tetapi

Sementara itu
cenderung berjak
amat serius. Jaw
Barat Indonesia
pendapatan ama
dengan menolak
Ekonomi Terpadu
Indonesia, kebij
dan Perluasan Pe
tersebut belum
dilihat dari kema
perekonomian na

Berdasarkan
spasial pada tar
provinsi di Pular
Bruto (PDB) rat
pembentukan P
peranan antar ka

¹ Luas lahan s
lahan non pertanian

akan ada efek penetes (*trickle down effect*) justru menciptakan berbagai macam persoalan. Industrialisasi perekonomian terkonsentrasi di Jawa (Jakarta dan sekitarnya). Hal ini memicu urbanisasi, mengakibatkan biaya konstruksi dan infrastruktur melonjak tajam. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, kebutuhan lahan makin meningkat, beban kota-kota besar dan sekitarnya makin berat. Memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan industri dan property, alih fungsi lahan produktif menjadi pilihan utama.

Laju alih fungsi lahan pertanian yang tinggi, bersamaan dengan peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang makin mahal. Sementara kemampuan produksi pangan terutama beras cenderung menurun, sehingga ketergantungan terhadap impor makin besar. Hal ini akan membawa masalah lain, krisis pangan dalam jangka panjang menjadi ancaman yang serius. Bahkan diperkirakan tahun 2025 Indonesia terancam kelaparan, salah satu sebabnya karena luas lahan pertanian yang makin susut akibat alih fungsi lahan menjadi non-pertanian. Kejadian ini berlangsung di hampir seluruh wilayah Indonesia, tetapi di Jawa jauh lebih cepat¹.

Sementara itu, konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa pada masa lalu yang cenderung berjalan hingga hari ini, akhirnya menimbulkan kesenjangan yang amat serius. Jawa dan luar Jawa, Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antar kota dan perdesaan, demikian juga distribusi pendapatan amat timpang. Penyakit ekonomi ini terus diupayakan disehatkan dengan menolarkan berbagai macam program, mulai dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), pembentukan Kementerian Khusus Kawasan Timur Indonesia, kebijakan otonomi daerah, maupun program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan dan program tersebut belum mampu mengurai persoalan disparitas kawasan, hal ini dapat dilihat dari kemampuan secara spasial kontribusi kawasan terhadap pembentukan perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto).

Berdasarkan peranan wilayah/pulau struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2006 sampai tahun 2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata di atas 50 %, sementara KTI sumbangannya terhadap pembentukan PDB hanya rata-rata % (BPS, 2011). Secara rinci perbandingan peranan antar kawasan dapat disimak pada tabel 1.2. berikut ini:

¹ Luas lahan sawah cenderung menurun sebagai akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang mencapai 50 - 70 ribu Ha per tahun (Kementan RI).

Tabel 1.2. Peranan Kawasan Terhadap Pembentukan PDB, 2006 - 2010 (Persen)

No	Kawasan	Kontribusi/Tahun (%)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumatera	23,2	23,2	22,5	22,6	23,1
2	Jawa	58,5	58,2	58,2	58,6	58,0
3	Bali-Nusa Tenggara	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7
4	Kalimantan	9,3	9,8	9,6	9,2	9,2
5	Sulawesi	4,3	4,3	4,6	4,6	4,6
6	Maluku-Papua	2,2	2,0	2,4	2,3	2,4
Total		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Rendahnya kontribusi KTI terhadap PDB salah satu penyebabnya karena pangsa sektor primer (pertanian) masih dominan, berkontribusi terhadap PDRB terbesar (di atas 40 %), itupun tumbuh dengan lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 % tenaga kerja. Apalagi kegiatan utama perekonomian sektor pertanian masih bersifat subsisten, kegiatannya masih cenderung tradisional, kemampuan *scale of economic*-nya masih rendah. Produk pertanian belum memiliki keterkaitan yang kuat terhadap industri hilir, produk pertanian *value added*-nya masih rendah karena mata rantai kegiatan ekonomi (industri pengolahan) belum berjalan.

Dalam pada itu, rendahnya kapasitas ekonomi KTI sebagai dampak dari rendahnya investasi baik yang berasal dari dalam dan luar negeri dibandingkan daerah lain. Ini makin diperparah ketersediaan infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang memadai (MP3EI Bappenas, 2011).

Memaksimalkan Potensi melalui Keberpihakan

Mencermati permasalahan di atas, KTI sesungguhnya dapat diberdayakan dan menjadi lokomotif perekonomian nasional. Ada banyak potensi yang dimiliki oleh KTI yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Jika digabungkan, lebih dari separuh luasan Indonesia berada di kawasan tersebut, meskipun disadari bahwa pasar utama kegiatan ekonomi (produksi) berada di Pulau Jawa. Jika diurai satu persatu potensi per kawasan di wilayah KTI ada beragam komoditi yang dibutuhkan untuk keperluan domestik dan ekspor, Kalimantan merupakan lumbung energi (migas dan batubara), serta industri perkayuan, untuk wilayah Sulawesi potensi pertanian, perkebunan, pertambangan maupun perikanan cukup besar, wilayah Nusa Tenggara potensi yang dimiliki diantaranya pariwisata, perikanan dan peternakan. Sedangkan wilayah Maluku-Papua potensinya meliputi

pangan, perikanan
Papua - Kepulauan

Dengan kondisi
pusat. Tidak bisa h
serta model pem
yang baik, akan tet
meskipun ada per
utama dengan me
pembangunan ind
KTI dipastikan keb
jika dilihat dari kor

Kebijakan pem
memanfaatkan pot
KTI. Salah satu mod
menjadikan KTI seb
teori "dorongan ku
Rodan, menurut tes
wilayah terkebelaka
diperlukan suatu
bentuk suatu minim

Kebijakan ini m
ini bergeser di kawa
USA dan Eropa Timu
wilayah KTI. Outlet-
di atas rata-rata me
di KTI *overhead* sos
punya keyakinan de
umumnya bahwa KT
hambatan, justru dis
dan investasi peme
investasi swasta ras
meminimalkan biaya

Industri pengola
sektor-sektor potens

² Lihat M. L. Jhing
Publisher, Vrinda Publ.

pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara umum, wilayah Papua – Kepulauan Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Dengan kondisi seperti itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan bersifat normatif dan tradisional, serta model pembangunan MP3EI semata. Konsep MP3EI merupakan “impian” yang baik, akan tetapi konsep ini belum dapat memberdayakan KTI secara optimal, meskipun ada pemikiran bahwa wilayah ini akan diposisikan sebagai gerbang utama dengan membangun pelabuhan besar di Bitung. Dengan tidak membarengi pembangunan industri yang memiliki *linkage* dengan komoditi yang dihasilkan di KTI dipastikan kebijakan ini belum banyak membantu menghela perekonomian KTI jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan pembangunan yang lebih “berpihak” sangat dibutuhkan, terutama memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing wilayah yang ada di KTI. Salah satu model kebijakan agar perekonomian nasional seimbang, sekaligus menjadikan KTI sebagai lokomotif ekonomi nasional kedepan adalah menerapkan teori “dorongan kuat” (*Big Push Theory*) yang diperkenalkan oleh Rosenstein-Rodan, menurut tesis ini untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi wilayah terkebelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut kearah kemajuan diperlukan suatu “*big push*” atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu minimum investasi².

Kebijakan ini memiliki *raison d’etre*, karena percaturan ekonomi global saat ini bergeser di kawasan pasifik. Negara-negara tujuan pasar, China, Jepang, Korea, USA dan Eropa Timur lainnya berada di kawasan ini (Pasifik) yang dekat dengan wilayah KTI. Outlet-outlet ekonomi di KTI perlu dikembangkan dengan kecepatan di atas rata-rata melalui pembangunan *overhead* sosial, karena kendala utama di KTI *overhead* sosialnya masih rendah, yang menimbulkan biaya tinggi. Kita punya keyakinan dengan keluar dari kotak belunggu (*out of box*) pemikiran pada umumnya bahwa KTI sulit dikembangkan dalam jangka pendek karena banyaknya hambatan, justru disitulah diperlukan “keberpihakan”. Pembangunan infrastruktur dan investasi pemerintah porsinya diperbesar, karena bila hanya mengandalkan investasi swasta rasanya sulit, karena swasta cenderung berpikir efisiensi dan meminimalkan biaya produksi (*scale of economic*) dikedepankan.

Industri pengolahan berbahan baku sektor pertanian, perikanan maupun sektor-sektor potensial yang dihasilkan oleh KTI menjadi keniscayaan dibangun

² Lihat M. L. Jhingan, 1998, *The Economics of Development and Planning*, Edition, 31. Publisher, Vrinda Publ.

di wilayah ini. Dengan demikian produk-produk tersebut akan memiliki *value added*, dengan sendirinya akan menimbulkan dampak pembangunan dan dampak ekonomi yang bersifat *positive externalities*. Aspek demografinya pun akan terkena imbas, ekonomi yang tumbuh cepat akan menarik orang (penduduk) untuk datang sehingga dalam jangka panjang beban kependudukan di Jawa akan bergeser ke luar Jawa selain dipengaruhi oleh kegiatan transmigrasi.

Mengembangkan industri-industri pengolahan di KTI, terutama yang berorientasi ekspor ke wilayah pasifik justru akan lebih efisien karena letaknya strategis, artinya wilayah KTI memiliki keunggulan komparatif dan dalam jangka panjang keunggulan kompetitif pun akan diraih. Optimisme itu perlu dibangun, dengan tidak hanya mengandalkan pakem berpikir para ekonom yang cenderung menekankan pada faktor efisiensi.

Pola berpikir dan tindakan lama harus diubah secara radikal bila ingin Indonesia lebih maju dan merata, serta memanfaatkan potensi dan posisi yang strategis di wilayah KTI. KTI sebagai masa depan bisnis, terutama untuk agrobisnis dan pertambangan. Sejauh ini, potensi sumber daya alam yang melimpah di KTI, belum digarap maksimal. Berbicara agrobisnis dan pertambangan, serta komoditi strategis lainnya Pulau Jawa merupakan masa lalu, Pulau Sumatera *exiting* (masa kini) dan pengembangan bisnis di masa depan, tempatnya adalah KTI.

Menerawang Indonesia, KTI Lokomotif Ekonomi Nasional

Kerjasama ekonomi regional dan internasional menjadi trend dan keharusan saat ini. Eropa yang cenderung menjadi unitarian dalam kegiatan ekonomi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan kekuatan dengan adanya penyatuan, baik dalam kegiatan ekonomi maupun mata uang tunggal. Demikian halnya model kerjasama lainnya, seperti *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC), sementara di kawasan regional Asia, Indonesia "terikat" dalam ASEAN community maupun ASEAN+2 (perkumpulan negara-negara ASEAN plus India dan China) maupun kerjasama dalam bentuk *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Model kerjasama regional dan internasional tersebut akan menguntungkan dengan berbagai catatan penting. Tanpa masuk dalam jaringan kerjasama sulit untuk mempercepat pembangunan nasional, karena itu diperlukan kesiapan dan kemampuan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan yang ada. Diantara keunggulan yang dimiliki adalah potensi komoditi serta letak strategis KTI yang dekat dengan pasar internasional.

Dorodjatun Kuntjoro-jakti (2012) menyebutkan bahwa ada tiga unsur besar penentu nasib bangsa-bangsa kedepan, yakni geografi, demografi dan sejarah

bangsa³. Namun, jika kita menafsirkan geografi dengan bangsa, demografi akan menemui sebagai mitra, pernah dijajah inferior akan "traumatic" walaupun sejarah baikny bangsa. Lain hal pembangunan dirinya sebagai pencatatan ekonomi betapa strateg sangat mengar

Geografi ti strategis, tetap bukan hanya b udara untuk n negara yang b ada di wilayah informasi yang

Selain wila transportasi na negara. KTI me utama pasar int pergeseran par untuk bisa men Potensi konflik y dibandingkan de Utara, atau Jepar akan merusak t meningkat, aktif

Persoalan k memiliki pendud

³ Lihat, Dorodjatun Kuntjoro-jakti (2012). *Abad ke 21*. Jakarta.

bangsa³. Namun menurut hemat saya, sejarah peradaban bangsa cenderung menafsirkan dirinya bangsa-bangsa tertentu merasa lebih superior dibandingkan dengan bangsa lain terutama bangsa bekas jajahan. Bangsa penjajah selamanya akan menempatkan dirinya paling unggul, bangsa-bangsa lain diposisikan bukan sebagai mitra strategis. Dalam konteks seperti itu boleh jadi Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa diperlakukan sebagai sub ordinasi, perasaan inferior akan terpelihara. Karena itu jika Indonesia mau maju perasaan-perasaan "traumatic" wajib dilepas, tidak perlu jadi beban sejarah. Artinya peristiwa sejarah baiknya bukan menjadi pemicu utama kemajuan kegiatan perekonomian bangsa. Lain halnya faktor geografi dan demografi merupakan faktor determinan pembangunan ekonomi. Singapura sebagai negara kecil sudah dapat membuktikan dirinya sebagai negara maju yang bermodalkan letak geografis strategis dalam percaturan ekonomi global di kawasan Asia. Sementara China dapat membuktikan betapa strategisnya arti pembangunan yang dilandaskan faktor penduduk dan sangat mengandalkan pasar domestik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Geografi tidak hanya sekedar melihat keberadaan suatu negara yang bersifat strategis, tetapi juga melihat dari aspek tata ruang, karena pemanfaatan ruang bukan hanya berbicara tanah, akan tetapi juga berbicara tentang laut dan wilayah udara untuk menempatkan satelit dalam rangka membuka pemahaman bagi negara yang bersangkutan bahwa betapa strategisnya ruang angkasa luar yang ada di wilayah mereka, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini.

Selain wilayah udara, wilayah laut yang merupakan urat nadi kegiatan transportasi nasional dan internasional menjadi sangat berarti bagi sebuah negara. KTI memiliki garis pantai yang panjang sekaligus wilayah penghubung utama pasar internasional perlu diberdayakan secara optimum, artinya diperlukan pergeseran paradigma pembangunan kedepan yang bergeser ke wilayah timur untuk bisa menjadi pemain utama perekonomian dunia di wilayah Asia-Pasifik. Potensi konflik yang relatif kecil antar negara tetangga yang berada di beranda KTI dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Korea Utara, atau Jepang dan China. Potensi konflik yang tinggi antar tetangga cenderung akan merusak tatanan ekonomi sebuah wilayah, biaya penanganan keamanan meningkat, aktifitas ekonomi masyarakat terganggu.

Persoalan kedua yang perlu dicermati, yakni faktor demografi. Indonesia memiliki penduduk terbesar setelah China. India dan USA, dengan jumlah penduduk

³ Lihat, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, 2012, *Menerawang Indonesia; Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke 21*. Jakarta, Alvabet.

yang besar peluang untuk mengembangkan SDM berkualitas cukup tinggi. Usia produktif akan didapatkan lebih banyak yang akan mengakumulasi *capital* dan kegiatan ekonomi. Kelompok usia produktif pada kenyataannya memiliki kontribusi tidak sedikit mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja sebaran jumlah penduduk di Indonesia begitu timpang antar kawasan, lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di kawasan barat, terutama Jawa. Pola penyebaran penduduk melalui kebijakan transmigrasi menjadi salah satu solusi penting, namun bukan satu-satunya. Diperlukan kebijakan lain untuk mendorong pergerakan penduduk ke wilayah timur melalui serangkaian kegiatan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kegiatan industri serta kegiatan ekspor berbasis sumber daya alam yang dilakukan di kawasan timur dengan sendirinya akan menarik tenaga kerja dari wilayah yang padat penduduknya. Dalam jangka panjang secara perlahan distribusi penyebaran penduduk yang timpang akan terkoreksi, meski perubahannya tidak terlalu drastis.

Faktor demografi yang timpang sudah barang tentu selamanya akan menciptakan ketimpangan ekonomi, efeknya terhadap penumpukan (terkonsentrasi) kegiatan ekonomi di wilayah tertentu (padat penduduk) sebagai tujuan pasar. Sementara wilayah yang memiliki potensi dan kekayaan dengan jumlah penduduk yang sedikit cenderung akan "diabaikan" sebagai basis produksi yang bernilai tambah. Maka untuk memajukan ekonomi wilayah timur, faktor demografi diperlukan pembenahan, terutama penyebaran penduduk produktif.

Dua faktor inilah sangat menentukan perjalanan bangsa kedepan dengan memposisikan wilayah timur sebagai lokomotif baru kegiatan perekonomian. Dengan syarat pemerintah dan masyarakat wilayah timur terutama di Sulawesi, Maluku dan Papua mampu beradaptasi dan terbuka dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi yang dibawa oleh penduduk pendatang. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan berpikir holistik dan integratif, dengan jumlah penduduk yang sedikit sulit untuk berkembang, karena itu kebijakan penyebaran penduduk baik resmi maupun tidak resmi dengan usaha sendiri harus diterima dengan tangan terbuka. Karena ada kecenderungan di era otonomi daerah, beberapa pemerintah daerah di timur cenderung menolak kebijakan transmigrasi dan penduduk pendatang. Semoga ini menjadi renungan, bahwa faktor geografis wilayah KTI sangat strategis, namun diperlukan pembenahan faktor demografinya.

Daftar Pus

Arham, Mu

Ket

Wor

Badan Pusa

Bappenas R

Indo

Kementerian

Prel

Peng

Kuntjoro-jak

abad

Daftar Pustaka:

- Arham, Muh. Amir, 2013, Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa, Gorontalo, Workingpaper FEB UNG.
- Badan Pusat Statisti, 2011, Data Startegis, Jakarta.
- Bappenas RI, (2011), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Jakarta.
- Kementrian Luar Negeri RI, 2011, ASEAN Connectivity in Indonesian Context a Preliminary Study on Geopolitics and Maritime Transport, Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK).
- Kuntjoro-jakti, Dorodjatun (2012), Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga abad ke-21, Jakarta, Pustaka Alvabet.